



MADRI MINTA PEMKAB PERHATIKAN FASILITAS WISATA BAGI DISABILITAS



**LEGISLATOR MINTA
PIHAK KETIGA TINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN DI BERAU**



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

MADRI MINTA PEMKAB PERHATIKAN FASILITAS WISATA BAGI DISABILITAS

TANJUNG REDEB - Pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau saat ini menjadi fokus Pemkab Berau. Namun, satu hal yang belum terpenuhi yakni, penyediaan fasilitas wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas.

Hal itu yang masih menjadi perhatian Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Baik dari pelayanan, hingga pemenuhan sarana dan prasarana (Sapas)-nya. Dijelaskannya, di tempat wisata perlu disiapkan baik dari turunnya speedboat harus mendapat perhatian, khususnya jika berada di daerah pesisir.

"Bahkan dari turunnya mobil hingga menuju tempat wisata harus ada perhatian khusus penyandang disabilitas," terangnya.

Jika perlu, pemerintah daerah atau pelaku wisata dapat memanfaatkan kemampuan disabilitas yang memiliki kemampuan tertentu. Seperti, membuat kerajinan tangan atau ukuran misalnya.

"Karena masing-masing pasti punya keahlian sendiri termasuk disabilitas. Dan karya mereka bisa ditampilkan di tempat-tempat wisata," jelasnya.

Diungkapkannya, di Kabupaten Berau belum ada yang menaungi hal itu. Seharusnya dibentuk lembaga, persatuan atau organisasi yang memanfaatkan sumber daya manusia disabilitas agar mereka memiliki semangat hidup dengan karya mereka.

"Daripada mereka stress sampai depresi dengan kehidupannya sehari-hari, karena tidak bisa berkarya lebih baik dimanfaatkan. Tuhan memberikan kelemahan pada seseorang pasti ada kelebihanannya," ucapnya.

Madri berharap pemerintah daerah untuk dapat memenuhi fasilitas wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas. (Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza



Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong

LEGISLATOR MINTA PIHAK KETIGA TINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI BERAU

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong meminta pihak ketiga untuk berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau. Khususnya, bagi kampung-kampung yang berada di lingkaran perusahaan.

Untuk membantu meringankan beban pemerintah daerah jika terjadi persoalan atau kendala pendidikan yang dekat dengan perusahaan.

"Kalau pendidikan semuanya di bebankan kepada pemerintah daerah, bisa bonyok kita. Pastinya butuh peran pihak ketiga," jelasnya.

Sebab, jika perusahaan tersebut mampu menciptakan dunia pendidikan yang berkualitas dan juga fasilitas kesehatan itu tentunya akan menjadi perusahaan yang bagus dan memiliki citra yang baik.

"Khususnya untuk anak-anak dari karyawan mereka dan untuk karyawan mereka sendiri," ucapnya.

Diakuinya, hak pendidikan adalah hak seluruh warga Indonesia dan wajib untuk didapatkan. Keterlibatan pihak ketiga untuk bekerjasama dengan Pemda sangat dibutuhkan guna membangun pendidikan yang merata ter-

utama di Kabupaten Berau.

"Kontribusi dalam hal pembangunan atau bisa memberikan fasilitas pendidikan yang rata," bebernya.

Contoh saja di Bulungan, kata Dia, ada perusahaan sawit yang membantu membangun peningkatan pendidikan di sana. Bahkan malah lebih unggul dari sekolah lain yang ada.

"Kita perlu simbiosis mutualisme jadi, perusahaan juga dapat menyediakan kualitas pendidikan yang bisa menjadi unggulan bagi daerah kita," tutupnya.

(Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

KOMISI III BAKAL KAWAL PEMBANGUNAN JEMBATAN KELAY III HINGGA TEREALISASI

TANJUNG REDEB - Pembangunan Jembatan Kelay III di Kabupaten Berau terus dipertimbangkan untuk direalisasikan, baik oleh eksekutif maupun legislatif.

Diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto, bahwa pembangunan Jembatan Kelay III bakal direalisasikan secara bertahap. Mengingat rencana pembangunannya akan memakan anggaran yang cukup besar.

Butuh kerja sama dengan pemerintah daerah agar pembangunan tersebut dapat segera terealisasi. Pihaknya sebagai Komisi III menegaskan akan terus mendukung dan berkomitmen untuk mengawal pembangunan Jembatan Kelay III.

"Pembangunan itu menjadi salah satu prioritas Komisi III untuk diusulkan," tegasnya.

Sebagai langkah awal, dijelaskannya yakni pembebasan lahan. Setelah itu akan dibangun pondasinya terlebih dahulu. Dibeberkannya, membutuhkan anggaran sebesar Rp 200 miliar hingga jembatan rampung dibangun.

Kendati begitu, jembatan yang ada saat ini yakni Jembatan Sambaliung tetap akan dimanfaatkan dan dimaksimalkan penggunaannya.

"Mungkin tahun ini sebagai langkah pertama bisa dibebaskan lahan dulu baru tahun depan bisa dilakukan pembangunan pondasinya," tutupnya. (Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza



Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau Nurung.

LEGISLATOR BERHARAP LISTRIK DESA BISA TEREALISASI DI BERAU

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung menyarankan kepada pemerintah agar program listrik masuk desa bisa terealisasi. Hal itu untuk mengatasi pemadaman bergilir yang masih sering terjadi di Bumi Bati-wakkal.

"Listrik ini memang tugasnya pemerintah yang bagaimana ada listrik masuk desa. Tapi, program tersebut tidak serta merta baru diprogramkan langsung jadi," ucapnya Kamis (12/10/2023).

Namun pihaknya mengimbau agar PLN UP3 Berau dapat segera melakukan verifikasi peninjauan langsung di lapangan untuk mengetahui

jumlah persisnya terkait berapa rumah yang membutuhkan aliran listrik. Ditambah jumlah tiang listrik yang teraliri pada daerah tersebut.

"Beberapa waktu lalu kami sudah bertemu direktur PLN bahas listrik. Terutama daerah tumbit melayu, tumbit dayak sari supaya bisa teraliri listrik," ungkapnya.

Selain itu pihaknya mengimbau OPD terkait dapat melakukan kolaborasi untuk menangani sulit listrik. Seperti halnya jalan poros yang rusak menuju ke lokasi pemukiman sulit listrik.

"DPUPR bisa lakukan pembangunan atau revitalisasi jalan di sana," tandasnya. (Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza



OPS ANTIK MAHAKAM 2023, POLRES PPU TANGKAP 15 TERSANGKA NARKOBA



**JUMLAH PENDUDUK DI PPU BERTAMBAH
6 RIBU ORANG SELAMA TAHUN 2023**



Wakapolres PPU Kumpul Bergas Hartoko saat konferensi pers Ops Antik Mahakam 2023, Kamis (12/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

OPS ANTIK MAHAKAM 2023, POLRES PPU TANGKAP 15 TERSANGKA NARKOBA

PPU - Sebanyak 14 kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Penajam Paser Utara (PPU) berhasil diungkap dalam Ops Antik Mahakam 2023. Dalam pengungkapan itu, tertangkap pula 3 residivis yang terancam hukuman lebih berat untuk ganjaran hukumannya.

Ops Antik Mahakam 2023 digelar selama sebulan mulai 19 September-9 Oktober 2023. Dalam kasus ini, diamankan sebanyak 15 tersangka yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu.

"Ada 11 kasus di wilayah Kecamatan Penajam, Sepaku 1 kasus dan Babulu 2 kasus," kata Wakapolres PPU Kumpul Bergas Hartoko dalam keterangan pers, Kamis (12/10/2023).

Dari 14 perkara narkoba tersebut, terdapat 15 tersangka dan total barang bukti sebanyak 67,22 gram sabu-sabu. Selain itu, barang bukti lainnya diamankan berupa delapan sepeda motor milik tersangka.

"Dari 14 kasus narkoba ini, 11 kasus ditangani Satresnarkoba Polres PPU, sementara 3 kasus lainnya ditangani oleh Polsek Penajam dan Sepaku," imbuhnya.

Adapun diketahui sluruh tersangka itu berperan sebagai perantara, pengedar dan sekaligus pemakai. Dari pengakuan mereka, rata-rata narkoba berasal dari Balikpapan.

Jadi, dalam melancarkan aksinya, mereka terlebih dahulu berkomunikasi dengan bandar dan perantara lainnya. "Lalu mereka ini mengambil barang di titik yang telah ditentukan," ungkap Bergas.

Lebih lanjut, selain tersangka baru ditangkap pula 3 di antaranya merupakan bekas menjalani hukuman (residivis) di kasus serupa. Yakni AR dan AS yang bebas pada Oktober 2022 dan RE yang dibebaskan pada Juli 2023.

Bahkan, ketiga orang residivis ini pernah divonis enam tahun dan tujuh tahun. Selama ditahanan dinilai berkelakuan baik, sehingga mendapatkan remisi.

"Setelah keluar penjara, mereka main lagi atau tidak kapok. Tentunya ada perlakuan hakim yang berbeda terhadap mereka ini. Karena 3 orang residivis ini akan mendapatkan emberatan karena perlahan melakukan pelanggaran yang sama," tegas Bergas. **(SBK)**





Pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Mawar (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)

JUMLAH PENDUDUK DI PPU BERTAMBAH 6 RIBU ORANG SELAMA TAHUN 2023

PENAJAM - Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bertambah 6.000 orang sepanjang 2023 menjadi sebanyak 190.000 jiwa dibanding yang tercatat pada akhir tahun 2022 sekitar 184.000 jiwa.

"Selama periode Januari-September 2023 tercatat pertambahan penduduk sekitar 6.000 orang," jelas Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara Mawar di Penajam, Rabu (11/10/2023).

Pertumbuhan penduduk yang tercatat tersebut, lanjut dia, sebagian besar disumbang oleh para pendatang yang pindah menjadi warga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tercatat lebih banyak pembuat kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) baru dari pada laporan kelahiran, tambah dia, menunjukkan bahwa pertambahan penduduk karena migrasi dari daerah lain.

Namun, Dinas Dukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bisa memastikan, apakah pertumbuhan penduduk itu dampak dari pembangunan Kota Nusantara, Ibu Kota Negara baru Indonesia ada sebagian di daerah berjudul Benau Taka itu, yakni di Kecamatan Sepaku.

Pertambahan penduduk Kabupaten Pe-

najam Paser Utara dari perpindahan warga luar daerah menjadi penduduk di daerah itu belum nampak signifikan dilihat dari pencatatan penduduk yang migrasi.

Sampai saat ini warga luar daerah yang pindah datang tercatat mengurus kependudukan ke Kabupaten Penajam Paser Utara rata-rata 10 kepala keluarga.

"Petugas mencatat dalam satu hari berkisar 10 kepala keluarga mengurus kependudukan dari luar daerah," ujarnya.

Rata-rata warga pendatang yang pindah menjadi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi untuk mencari kerja dan pindah tempat kerja atau pindah tugas maupun ikut keluarga yang sudah lama menetap di daerah setempat.

"Kendati tidak signifikan, tetapi penduduk terus bertambah selain dari faktor kelahiran," katanya.

Kemungkinan sejak Kecamatan Sepaku ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara baru Indonesia, bisa menjadi "magnet" warga pendatang dari berbagai daerah masuk Kabupaten Penajam Paser Utara, demikian Mawar. (Ant/MK)

Oleh Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor : Sambas



Kepala BKAD
Kabupaten
Penajam Paser
Utara, Provinsi
Kalimantan
Timur Muha-
jir (ANTARA/
Nyaman Bagus
Purwaniawan)

PEMKAB PPU BERHARAP PENYERAHAN ASET DI IKN DIBARENGI DANA INSENTIF

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berharap penyerahan aset yang berada di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dibarengi dengan pemberian dana insentif khusus untuk daerah berjuduk Benuo Taka itu.

Pemerintah kabupaten berharap ada penggantian yang diberikan pemerintah pusat, menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara Muhajir di Penajam, Rabu (11/10/2023), terhadap penyerahan aset yang ada di Kecamatan Sepaku.

Nilai aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Sepaku cukup besar, lanjut dia, sehingga ada penggantian yang diberikan bisa dalam bentuk dana insentif khusus.

Dana insentif khusus dapat digunakan daerah asal ibu kota negara baru Indonesia itu untuk mengimbangi pembangunan dan perkembangan Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia.

BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat nilai aset pemerintah kabupaten yang ada di Kecamatan Sepaku mencapai lebih kurang Rp595 miliar.

Aset milik pemerintah kabupaten yang ada di Kecamatan Sepaku itu, jelas dia, terdiri dari fasilitas pendidikan termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, guest house, tanah dan bangunan lainnya, jalan, hingga irigasi.

Aset Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Sepaku tersebar antara lain, pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Data aset pemerintah kabupaten yang ada di Kecamatan Sepaku, kata dia, telah diberikan kepada Otorita IKN sebagai tindak lanjut dari aturan penyerahan aset pada 30 Agustus 2023.

Penyerahan aset sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, tambah dia, karena memuat ketentuan penyerahan seluruh aset di Kecamatan Sepaku kepada pemerintah pusat atau Otorita IKN.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, juga bakal menyerahkan pegawai yang bertugas di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah Kota Nusantara.

Penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Otorita IKN dilakukan satu paket dengan penyerahan pegawai, demikian Muhajir. (Ant/MK)

Oleh Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor : Budi Suyanto



PERUMDA TIRTA MAHAKAM KUKAR BENTUK FORUM PELANGGAN



Miliki Kawasan Pertanian Produktif
yang Luas, Loa Kulu Siap Jadi Bagian IKN



Suasana Penandatanganan Berita Acara pengukuhan Forum Pelanggan Perumda Tirta Mahakam. (Ady/Radar Kukar)

PERUMDA TIRTA MAHAKAM KUKAR BENTUK FORUM PELANGGAN

TENGGAH- Perusahaan Umum Milik Daerah (Perumda) Tirta Mahakam kukuhkan forum pelanggan. Pengukuhan ini juga disaksikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah. Pengukuhan dilaksanakan di Pendopo Bupati Kukar, Kamis (12/10/2023).

Forum Pelanggan Perumda Tirta Mahakam yang baru dibentuk ini dinahkodai oleh Chairil Anwar. Edi berharap dengan dikukuhkannya forum pelanggan ini, mampu menjadi penghubung komunikasi antara Perumda Tirta Mahakam dan masyarakat sebagai pelanggan.

"Saya juga berterima kasih bahwa Forum Pelanggan ini bisa terbentuk dan semoga nanti ini produktif, kerja dan fungsinya betul-betul jalan," kata Edi.

Ia menambahkan, forum pelanggan harus mampu memahami setiap informasi yang berkenaan dengan Perumda Tirta Mahakam. Termasuk jika nanti terjadi penyesuaian tarif atau permasalahan lainnya.

"Forum ini harus paham juga kenapa harus dilakukan penyesuaian tarif, bagaimana hitungan-hitungannya harus dipahami, setelah itu baru disosialisasikan dengan pelanggan," kata Edi.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh orang nomor satu di Kukar ini, Perumda Tirta Mahakam sampai saat ini masih berupaya untuk meningkatkan pelayanan. Baik dari segi kapasitas dan kualitas pelayanan air minum.

"Alhamdulillah dari kerja dua tahun ini in-

frastrukturnya relatif bisa terpenuhi, tinggal diselesaikan. Ini bagian dari upaya langkah kami nanti untuk pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih di Kukar," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Mahakam, Suparno, menuturkan pembentukan forum pelanggan ini menjadi penting untuk memenuhi aturan keterbukaan dan pelayanan publik.

"Saya yakin dengan adanya forum pelanggan ini akan mempercepat informasi," kata Suparno.

Menurutnya, pembentukan Forum Pelanggan Perumda Tirta Mahakam akan menambah referensi dan informasi mengenai pelayanan air bersih di Kukar. Suparno berpendapat, semakin cepat informasi sampai kepada masyarakat, maka kualitas pelayanan semakin meningkat pesat dan berimbang.

"Harus diakui layanan publik tidak bisa 100 persen tetapi dengan adanya komunikasi dan informasi tentu akan mengkomodir apa yang diinginkan masyarakat," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur saat ini memiliki 20 kecamatan, 193 desa, dan 44 kelurahan. Bupati Kukar, Edi Damansyah berkeinginan agar pada tahun 2024 semua masyarakat harus bisa mengakses air bersih. (adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Salah satu kawasan pertanian di Kecamatan Loa Kulu. (Rafi'i/Media Kaltim)

Miliki Kawasan Pertanian Produktif yang Luas, Loa Kulu Siap Jadi Bagian IKN

TENGGARONG - Menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Loa Kulu memiliki segudang potensi di sektor pertanian dalam arti luas. Menjadikan kecamatan yang berpenduduk sekitar 51.639 jiwa ini siap, menjadi salah satu daerah penopang pangan di IKN nantinya.

Sektor pertanian pun menjadi yang paling besar di Kecamatan Loa Kulu. Bahkan menjadi satu diantara kawasan pengembangan pertanian yang ditetapkan oleh bupati Kukar. Dengan total lahan pertanian produktif mencapai 1.216,7 hektare (ha). Bahkan di Kecamatan Loa Kulu sudah memiliki pabrik beras, tepatnya di Desa Loh Sumber.

"Artinya ini sudah memiliki pabrik beras yang mana hulu dan hilirnya sudah ada," ungkap Camat Loa Kulu, Adriansyah.

Sektor perikanan pun tidak kalah penting. Di mana di sepanjang perairan Kecamatan Loa Kulu, terhampar ribuan keramba milik Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Tidak hanya budidaya ikan saja, di Desa Ponoragan

menjadi sentra pembibitan berbagai jenis ikan. Bahkan pasar ikan di Samarinda, sebagian besar berasal dari Loa Kulu.

Saat ini, Kecamatan Loa Kulu pun sedang berupaya untuk menciptakan hilirisasi sektor perikanan. Mengingat sektor ini sangat menjanjikan dan melimpah di Loa Kulu.

"Untuk menyambut IKN itu yang bakal kita persiapkan nantinya ya kemungkinan harapan kita dari pemerintah itu nanti mungkin ada sejenis pabrik ikan yang untuk diolah menjadi kering," lanjutnya.

Belum lagi, saat ini sudah adanya berdiri pabrik pengolahan jahe. Membuat gairah pertanian jahe di Desa Jonggon kembali naik dan diminati oleh petani disana. Juga ada peternakan sapi atau mini ranch di Desa Jonggon Jaya. Semakin memperlengkap sektor pertanian dalam arti luas di kawasan Kecamatan Loa Kulu.

"Jadi kita sudah desain sudah semua masuk," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Camat Samboja Barat, Burhanuddin. (Ady/Radar Kukar)

Kantor Camat Samboja Barat Dibangun Tahun Depan

TENGGARONG - Kecamatan Samboja Barat yang merupakan salah satu kecamatan baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sampai saat ini belum memiliki kantor sendiri. Untuk menjalankan roda pemerintahan, sejauh ini Kecamatan Samboja Barat masih menempati Kantor Desa Tani Bakti. Serta masih fokus dalam proses perpindahan domisili penduduk.

Camat Samboja Barat, Burhanuddin, mengatakan proses pembangunan kantor Kantor Kecamatan Samboja Barat akan mulai dikerjakan pada tahun depan. "Tahun ini masuk perencanaan, tahun depan realisasi pembangunan fisik kantor," ujar Burhanuddin, Kamis (12/10/2023).

Lokasi pembangunan kantor sendi-

ri, kata Burhanuddin, akan dibangun di wilayah Desa Tani Bhakti. Sebagai pusat pemerintahan kecamatan Samboja Barat. Saat ini prosesnya masih dalam tahap perencanaan dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar yang akan mengerjakan bangunan fisik kantor kecamatan baru tersebut.

Untuk desainnya, pembangunan meliputi kantor camat, Ruang Serbaguna, dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Bangunan tersebut akan berdiri diatas tanah seluas 2,5 hektare. "Tahun depan itu anggaran yang masuk ada sekitar Rp 22 miliar untuk pembangunan kantor camat," pungkasnya. (adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Camat Loa Kulu, Ardiansyah (Ady/Radar Kukar)

Jelang Perpindahan IKN, Kecamatan Loa Kulu Terus Bersiap

TENGGARONG - Kecamatan Loa Kulu menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang akan berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Camat Loa Kulu, Ardiansyah, menyebut pihaknya pun siap mengembangkan sektor pangan. Baik itu pertanian, peternakan dan perkebunan.

Untuk diketahui, Kecamatan Loa Kulu sampai saat ini bisa dikatakan sukses mengembangkan ketiga sektor tersebut. Bahkan beberapa sektor telah berhasil berinovasi dengan menghasilkan hilirisasi. Seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sumber Purnama milik Desa Loh Sumber. Yang sukses mengolah padi petani setempat menjadi beras produksi berkualitas.

Juga pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Jahe yang saat ini tengah dalam tahap penyelesaian, sebelum beroperasi di Desa Jonggon Jaya.

Di Kecamatan Loa Kulu juga terdapat perkebunan kelapa sawit beserta pabriknya. Belum lagi dari sektor peternakan, di Kecamatan Loa Kulu terdapat banyak peternak sapi yang sukses mengembalikan

sapi di lahan pasca tambang.

"Artinya ini merupakan upaya kita untuk dapat bermitra dengan IKN Nusantara dari sektor pangan," kata Adriansyah, Kamis (12/10/2023).

Ia juga menambahkan, untuk pengembangan wilayah Kecamatan Loa Kulu lebih lanjut. Pihaknya akan menyusun rancangan strategis pengembangan wilayah Kecamatan Loa Kulu bersama dengan pihak Badan Otorita IKN.

Nantinya, penataan ruang di Kecamatan Loa Kulu akan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Ia juga mengatakan pihaknya tengah fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM), agar dapat bersaing dengan kedatangan penduduk ke IKN.

"Baik itu dari pertanian, perikanan, dan perkebunan itu sudah dipersiapkan di Loa Kulu. Jadi loa Kulu sedang di tata ruang wilayahnya oleh pihak Otorita IKN. Jadi kita hanya menunggu saja kapan dari otorita ini untuk bisa pengembangan proyek strategis," pungkasnya.

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Camat Samboja Barat, Burhanudin. (Ady/Radar Kukar)

Pemerintah Kecamatan Samboja Barat Terus Dorong Perpindahan Domisili Kependudukan

TENGGARONG - Setelah pemekaran berjalan selama 7 bulan, Pemerintah Kecamatan Samboja Barat terus mendorong proses perekaman e-KTP. Menyusul perpindahan status warga yang kini masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Samboja Barat.

Camat Samboja Barat, Burhanuddin, mengatakan sampai saat ini pihaknya terus mendorong dan mensosialisasikan perpindahan domisili identitas penduduk tersebut. "Karena perekaman e-KTP yang baru ini menyangkut masalah identitas karena sudah masuk di kecamatan baru Samboja Barat, dan ini langkah pertama kami untuk melayani masyarakat karena perubahan status dari Kecamatan Samboja ke Kecamatan Samboja Barat," tutur Burhanuddin, Kamis (12/10/2023).

Sejauh ini, Burhanudin merasa proses berjalannya pemerintahan di kecamatan

yang notabene baru di Kutai Kartanegara (Kukar) ini, sudah berjalan dengan baik. Untuk mempercepat proses perpindahan domisili, dalam tanda pengenalan penduduk Kecamatan Samboja Barat, ia mengatakan pihaknya juga melakukan inovasi yang disebut Sistem Jemput Bola Perekaman e-KTP (Si Jemput Kembar).

Dimana program ini telah sukses berjalan di 10 desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja Barat. Dengan metode menerjunkan tim langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP. "Dan Alhamdulillah blanko KTP elektronik sudah mulai kami distribusikan, tahap pertama ada 3 ribu untuk di Kelurahan Salok Api Darat dan Karya Merdeka, dan 2 kelurahan lagi yakni di Kelurahan Margomulyo dan Sungai Merdeka," pungkasnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



TARI JEPEN MASSAL SUKSES SEMARAKKAN UPACARA HUT KE-24 KOTA BONTANG



BACA HALAMAN A2

**Kendarai Motor Ugal-ugalan,
Sepasang Suami Istri
Kedapatan Bawa Sabu**





Dua ribu penari Jepen di HUT ke-24 Bontang. (Syakurah/Radarbontang)

Tari Jepen Massal Sukses Semarakkan Upacara HUT ke-24 Kota Bontang

BONTANG – Sebanyak 2 ribu penari sukses menampilkan Tarian Jepen khas Bontang di Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bontang ke-24 di Stadion Bessai Berinta, Lang-lang, Kamis (12/10/23) pagi.

Para penari yang berasal dari pelajar SMP, SMA, dan SMK se-Bontang tersebut tampak memenuhi lapangan. Semuanya mengenakan kaos hitam dengan kain jarik, plus menggunakan udeng khas Kota Bontang.

Para penari mulai beraksi pasca upacara berakhir. Menampilkan defile dari masing-masing OPD di Kota Bontang.

Antusias warga terlihat sangat tinggi dengan membludaknya penonton di setiap sisi Stadion Bessai Berinta. Termasuk para orang tua murid.

Tidak hanya itu, para pejabat juga turut memeriahkan Tarian Jepen tersebut dengan ikut turun ke lapangan bergabung dengan para penari lainnya.

Sebelumnya, penyesuaian di lapangan dinilai cukup singkat, yakni 2 hari saja, namun para murid dapat menampilkan tarian dengan maksimal. Penari juga lebih banyak dari tahun lalu, dari seribu menjadi dua ribu penari. Tentu ini merupakan antusias anak muda kota Bontang untuk berkontribusi dalam HUT Kota Bontang.

Penulis: Syakura
Editor: Yusva Alam





Andi Faizal Sofyan Hasdam, Ketua DPRD Kota Bontang saat diwawancara awak media. (Dwi S)

HUT ke-24 Kota Bontang, Ketua DPRD: Bontang Harus Lebih Sejahtera ke Depan!

BONTANG - Tepat di Hari Kamis (12/9/2023) ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kota Bontang. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam berharap, agar Kota Bontang lebih sejahtera lagi ke depannya.

Andi Faiz sapaan akrabnya mengatakan, dengan adanya segala kebijakan dan peraturan yang ada, akan mendatangkan kebaikan sehingga masyarakat Kota Bontang lebih sejahtera lagi buat ke depannya.

Perayaan HUT ke-24 ini diharapkan menjadi momentum untuk kita terus mengevaluasi diri, sebagai penyelenggara pemerintah yang telah dipilih langsung oleh rakyat.

"Alhamdulillah hari ini Kota Bontang sudah berumur 24 tahun. Mudah-mudahan segala kebijakan, terus peraturan-peraturan yang sudah kita buat semuanya mendatangkan kebaikan," ucapnya saat diwawancarai, Kamis (12/10/2023).

Ditambahkannya, Kota Bontang saat ini sudah sangat maju, lebih modern, dan sudah bisa dibilang tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Ada banyak kemajuan terdapat di Kota Bontang ini, dari berdirinya mall, tempat wisata, bahkan mangrove sekalipun.

"Kota Bontang sekarang sudah banyak bergerak menjadi kota yang lebih maju. Begitu banyak investasi, interaksi kehidupan sosialnya juga, bahkan sekarang ada Mall dan tempat rekreasi lainnya yang terdapat di Kota Bontang", paparnya.

Politisi Partai Golkar ini juga berharap, di hari ulang tahun yang ke-24 ini Kota Bontang lebih berkembang dari yang sebelum-sebelumnya, lebih maju, mengembalikan tingkat ekonomi penduduk Kota Bontang yang sempat menurun akibat pandemi, bahkan tidak kalah dengan kota-kota besar yang ada.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



Kepala DPMPTSP Bontang, Asdar Ibrahim. (Syakurah/Radarbontang)

HUT ke-24 Bontang, Kepala DPMPTSP Ingin Lebih Baik Jaring Investor Datang

BONTANG – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Asdar Ibrahim turut hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bontang ke-24 di Stadion Bessai Berinta, Lang-Lang, Kamis (12/10/23).

Ia menjelaskan, HUT Kota Bontang ke-24 tahun ini sangat membanggakan terutama dalam pembangunannya.

“OPD kami menjadi salah satu tempat untuk pembangunan kota Bontang, dimana kita ramah investasi sesuai dengan arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang,” ujarnya.

Tentu kita terus lakukan keseragaman, koordinasi, promosi, untuk meningkatkan investasi yang ada di Kota Bontang baik yang sekarang maupun

yang akan datang.

“Sampai saat ini kita masih menjaring investor-investor nasional maupun daerah, dan itu akan terus kami lakukan secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Beberapa investasi di Kota Bontang tahun depan juga sudah masuk dalam DPMPTSP, yang berupa investasi dari perusahaan-perusahaan. Selain itu wilayah pemkot di Bontang Lestari juga telah terbuka untuk para calon investor di sektor industri.

Asdar berharap untuk Kota Bontang lebih semangat dalam berkarya, apalagi Bontang di umur ke 24 tahun sudah mulai bisa berpacu dalam hal pembangunan, yang semakin banyak untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi. (adv/sya)

Segera Daftar! 4 Hari Lagi Pelatihan Tukang Bangunan Gedung Bersertifikasi Dimulai

BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Bidang Bina Konstruksi akan mengadakan pelatihan bersertifikasi bagi profesi tukang di Kota Taman. Warga Bontang berprofesi tukang bisa segera mendaftar sebelum kehabisan kuota.

Dijelaskan Kepala Dinas PUPRK, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon), Dedy Nugraha, bahwa pelatihan ini merupakan pelatihan dan sertifikasi untuk tukang bangunan gedung jenjang 1 Kota Bontang.

Terdapat beberapa Jabatan kerja yang akan dilatihkan, di antaranya:

Tukang pasang bata/dinding/bricklaying (TK Bata)

Tukang besi beton/babender/barbending

Tukang plester/tukang plesteran/plesterer/solid plasterer

Tukang pasang ubin/tukang pasang lantai tegel ubin/marmer

Tukang cat/tukang cat bangunan

"Daftar segera peserta terbatas hanya untuk 50 pendaftar pertama. Pelatihan ini juga dijamin gratis 100 persen," berbarnya.

Para peserta pun akan mendapat fasilitas seperti APD (helm sepatu boots, rompi, sarung tangan), seminar kit, baju kaos praktek, sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sertifikat pelatihan/diklat.

Untuk waktu pelatihan rencananya akan diadakan 16 Oktober – 28 Oktober 2023. Bagi warga Bontang yang berminat bisa menghubungi Sidrah (085773563552), Henni (081250514421), atau Jai (085246946988)

Ditambahkan Dedy, bersamaan dengan pelatihan tersebut, pihaknya juga mengadakan pelatihan dan uji kompetensi untuk sertifikasi operator alat berat excavator. Diikuti sebanyak 35 calon peserta dan 15 calon peserta driver dump truck.

Kegiatannya nanti 2 hari pembekalan materi dan 9 hari praktik lapangan, serta

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA **PUPR** **BNSP** **BerAKHLAK**

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TUKANG BANGUNAN GEDUNG JENJANG 1 KOTA BONTANG

DAFTAR SEGERA!
PESERTA TERBATAS HANYA UNTUK 50 PENDAFTAR PERTAMA.
GRATIS !!!

JABATAN KERJA

- ✓ A. Tukang Pasang Bata/Dinding/Bricklayer/Bricklaying (TK Bata).
- B. Tukang Besi Beton/Babender/Barbending.
- C. Tukang Plester/Tukang Plesteran/Plesterer/Solid Plasterer.
- D. Tukang Pasang Ubin/Tukang Pasang Lantai Tegel ubin/Marmer.
- E. Tukang Cat/Tukang Cat Bangunan.

PELAKSANAAN
16 Oktober - 28 Oktober 2023

FASILITAS

1. APD (Helm, Sepatu Boots, Rompi, Sarung Tangan)
2. Seminar Kit
3. Baju Kaos Praktek
4. Sertifikat Badan Nasional sertifikasi profesi (BNSP)
5. Sertifikat Pelatihan / Diklat

NARAHUBUNG

- ☎ Sidrah 085773563552
- ☎ Henni 081250514421
- ☎ Jai 085246946988

@bikon.bontang2020 **binakonstruksi(bikon bontang)** **bikonbontang@gmail.com**

Iklan pelatihan tukang bersertifikasi. (ist)

hari terakhir adalah ujian.

"Untuk anggaran alat berat kami terbantu dari Pokir Bapak Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Bontang dan anggaran

untuk pelaksana bangunan konstruksi gedung dari BJKW 5 Banjarmasin," pungkasnya.

Penulis/Editor: Yusva Alam

BPJS Ketenagakerjaan Launching Perlindungan Jaminan Sosial untuk 34.782 Pekerja Rentan Kota Bontang

BONTANG - BPJS Ketenagakerjaan Kota Bontang melaksanakan launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 34.782 pekerja rentan Kota Bontang, di Pendopo Rujan Wali Kota Bontang, Kamis (12/10/23).

Andi Kurnia, Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang menjelaskan, berdasarkan instruksi presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Memberikan arahan kepada Wali Kota Bontang untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran, untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya.

"Sehingga ditetapkan Peraturan Wali Kota Bontang nomor 3 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan sosial bagi pekerja rentan," jelasnya.

Pada tahun 2023 ini melalui APBD perubahan, Pemkot Bontang telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1.735.000.000 untuk pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada pekerja rentan, yang berlaku untuk bulan Oktober, November, Desember.

"Sesuai dengan pendataan, pekerja rentan pada bulan Oktober sudah dibayarkan, sehingga untuk bulan selanjutnya mereka bisa mandiri dan pemerintah dapat membayar lagi pekerja rentan lainnya," tambahanya.

Zainuddin, Direktur Kepesertaan BPJS menjelaskan, bahwa sebanyak kurang lebih 4000 pekerja di Kota Bontang belum memiliki BPJS, sehingga bersama dengan Pemkot ia meminta untuk mencari agar seluruh pekerja di Bontang 100 persen tercover oleh BPJS ketenagakerjaan.

Zainudin juga turut mengapresiasi gerak cepat Pemkot Bontang dalam melindungi pekerjaanya. Tak tanggung-tanggung, berkat inovasi yang dilakukan tersebut, cakupan kepesertaan di Kota Bontang berhasil terdongkrak hingga hampir 95 persen dan saat ini menjadi yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

"Inovasi kreasi di Bontang ini luar biasa. Karena nggak banyak Pemda yang memberikan perhatian khusus ke pekerja informal. Namun Bontang justru memperhatikan itu, bahkan lebih dalam lagi Pak



Launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 34.782 pekerja rentan Kota Bontang. (Syakurah/Radarbontang)

wali ini masuk ke pekerja rentan dan juga disabilitas. Yang lebih membanggakan lagi, Kota Bontang ini hampir full coverage," ujar Zainudin.

Besarnya manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dibuktikan langsung dengan diserahkannya santunan kematian dan beasiswa kepada 2 ahli waris peserta yang meninggal dunia dengan total manfaat mencapai Rp120 juta.

Seperti yang diketahui, saat ini BPJS Ketenagakerjaan tengah fokus melakukan perluasan kepesertaan pada 4 ekosistem, yaitu ekosistem desa seperti perangkat desa, RT/ RW, Bhabinkamtibmas, kemudian ekosistem pasar yang didalamnya ada pasar modern dan tradisional, kemudian ekosistem pada e-commerce dan UMKM, serta yang terakhir ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu.

"Kami akan fokus pada pekerja informal yang memang jumlahnya sangat banyak, beberapa langkah akan kami tempuh antara lain menggunakan sistem keagenan dan juga sistem auto debet, ini akan memudahkan pekerja informal untuk membayar iuran tiap bulannya," tambahnya.

Mengakhiri keterangannya Zainudin berharap inovasi yang dilakukan oleh Pemkot Bontang mampu menginspirasi Pemda lainnya, sehingga semakin banyak pekerja rentan yang bisa terlindungi.

"Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melindungi para pekerja rentan. Tujuannya tentu agar mereka bisa Kerja Keras Bebas Cemas karena seluruh risiko kerjanya kami yang tanggung. Dengan komitmen dan kolaborasi yang baik dari

pemerintah daerah, saya yakin universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia akan segera terwujud," tutup Zainudin.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bontang, Dahlia Libriana mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Bontang agar bisa mewujudkan full coverage 100% program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bontang.

"Kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Bontang terkait masyarakat yang masih belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan agar full coverage 100% dapat tercapai" ucap Dahlia.

Di akhir keterangannya Dahlia mengucapkan terima kasihnya kepada Walikota Bontang dan jajaran atas inisiatifnya untuk mendaftarkan para pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang turut menginisiasi perlindungan kepada masyarakatnya terutama para pekerja rentan di sektor informal," tutur Dahlia.

Wali Kota Bontang, Basri Rase turut mengajak seluruh perusahaan yang ada di Kota Bontang, untuk benar-benar melaksanakan amanat pemerintah dengan mendaftarkan seluruh pekerjaanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam program Pemkot Bontang ini, para pekerja rentan yang mayoritas berprofesi sebagai tukang pijat tradisional, tukang ojek, pedagang, mekanik, dan kurir tersebut akan mendapatkan perlindungan 2 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). (adv/sya)



Rombongan tim penilai rekredensial bersama manajemen RSUD Bontang. (ist)

Perpanjangan Kerja Sama Layanan JKN, RSUD Rekredensial Ulang

BONTANG - Setiap tahun semua Rumah Sakit (RS) yang memberikan pelayanan JKN akan dilakukan rekredensial atau uji kelayakan ulang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pengelola JKN tersebut. RSUD Taman Husada yang juga sebagai mitra layanan JKN melaksanakan rekredensial, Rabu (11/10/2023) di RSUD Bontang.

Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan RSUD Taman Husada Bontang, dr Niken Titisurianggi, M.Kes, mengatakan, pelaksanaan rekredensial dalam rangka perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan pada periode 2024 mendatang.

Ia menambahkan, dalam hal ini

pihak BPJS Kesehatan melakukan penilaian terhadap kepatuhan RSUD sebagai mitra yang mampu menjalankan prosedur dan syarat yang telah diatur oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Ada beberapa pemeriksaan yang dinilai seperti syarat administratif, izin operasional, izin praktik para tenaga kesehatan, ketersediaan jumlah tempat tidur dan masih banyak penilaian lainnya," kata dr Niken saat dikonfirmasi, Rabu (11/10/2023).

Selanjutnya dr Niken mengatakan, dari hasil pemeriksaan dan visitasi RSUD mendapat nilai di atas rata-rata, sehingga dapat direkomendasikan untuk dilanjutkan kerja sama pelayanan JKN. Adapun standar nilai

yang diberikan yakni 70.

"Nilai kami di atas 70, artinya prosedur pelayanan sebagai rumah sakit tipe B telah memenuhi prosedur dan syarat yang diberikan," katanya.

Penilaian rekredensial ini turut disaksikan pula oleh perwakilan dari PERSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) dan dinas kesehatan kota Bontang sehingga evaluasi yang objektif ini berjalan dengan baik.

Niken menambahkan standar layanan yang diberikan ini termasuk dalam wujud komitmen rumah sakit untuk melayani peserta JKN.

"Komitmen janji layanan ini juga termasuk dalam penilaian dari JKN," tutupnya. (yah/adv)



Tersangka YW (34) (kanan bawah) dan R (44) (Kiri bawah) warga Marang Kayu, Kecamatan Kutai Kartanegara saat ditangkap Unit Reskrim Marangkayu. (ist)

Kendaraai Motor Ugal-ugalan, Sepasang Suami Istri Kedapatan Bawa Sabu

BONTANG - Unit Reskrim Marangkayu berhasil meringkus dua tersangka pengedar narkoba jenis sabu. Dua tersangka itu merupakan sepasang suami istri, kedapatan membawa sabu seberat 0,75 gram, di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Rabu (11/9/2023).

Tersangka berinisial YW (34) dan R (44) didapat saat melintas di pemukiman warga dari Desa Sebuntal menuju Jalan Poros Bontang Samarinda. Keduanya mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, di KM 7, RT. 20, Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai

Kartanegara.

"Melihat ada gerak gerik mencurigakan dari keduanya, lantas anggota Reskrim Polsek Marangkayu berusaha menghentikan keduanya," ujar Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prasetya melalui Kapolsek Marangkayu, Iptu Fahrudi.

Tersangka R (44) mengakui bahwa dirinya bersama suami dari membeli sabu disuruh oleh seseorang berinisial Y. Sabu itu dibeli dari seorang di Kampung Citra, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.

"Saat digrebek sabu langsung diturunkan di pinggir jalan, di atas semak-semak tidak jauh dari tersangka.

Ditemukan juga dua poket beserta 12 plastik klip yang dijatuhkan di pinggir jalan," tambahnya.

Barang Bukti yang disita itu adalah dua poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,75 gram, uang sisa upah pembelian sabu sebesar Rp 45 ribu, 12 buah plastik klip, serta handphone merek Samsung berwarna biru.

Tersangka dijerat pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Ancaman maksimal 20 tahun penjara," pungkasnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI JUMAT
13 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



RUMAH RUBUH TIBA-TIBA KEJUTKAN WARGA DI KLANDASAN ILIR



**PERTAMINA BANTAH ISU
PENGHAPUSAN PERTALITE, HANYA
PENAMBAHAN BAHAN NABATI**



Rumah warga bernama Prayoga di RT 27 Klandasan Ilir rubuh pada Jumat (13/10) pagi.

RUMAH RUBUH TIBA-TIBA KEJUTKAN WARGA DI KLANDASAN ILIR

BALIKPAPAN - Warga RT 27 Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Kota dikejutkan oleh kejadian rumah rubuh pada Jumat (13/10/2023) pagi sekitar pukul 07.05 Wita. Bahkan warga yang hendak beraktifitas pun sempat mencari sumber suara keras jatuhnya material bangunan tersebut.

Pemilik rumah bernama Prayoga mengatakan, jika kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tak ada tanda-tanda bahwa bangunan rumah khususnya bagian loteng depan akan rubuh.

"Nggak ada tanda-tanda apa-apa tadi itu. Tau-tau aja langsung rubuh dan nyaring suaranya," ujarnya.

Usai kejadian, Yoga pun langsung mengevakuasi keluarganya ke tempat yang lebih

aman, sambil menunggu apakah ada rubuhan susulan dari tempat tinggalnya tersebut.

"Habis itu saya bawa keluar semua anak istri. Cuma ini motor aja nggak sempat diselamatkan," jelasnya.

Saat ini dirinya dibantu sejumlah warga akan melakukan pemeriksaan dan pembersihan material bangunan yang rubuh.

Sementara itu Plt Trantib Kelurahan Klandasan Ilir, Eka Anugrah mengatakan, untuk langkah awal adalah membersihkan puing-puing bangunan yang rubuh agar tidak menghalangi jalan.

"Kita bersihkan dulu ini setelah dinyatakan aman oleh personel BPBD yang tadi sudah ngecek lokasi," ujarnya.

Sementara untuk kondisi rumah sendiri tidak dapat ditinggalin lagi. Dan pihak pemilik rumah pun harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman. "Tadi sudah kita bicarakan dengan pemilik rumah, sementara dia tinggal di rumah orangtuanya dulu di Sepinggian," tambahnya.

Dikatakan Eka Anugrah, memang sebagian besar bangunan di wilayah RT 27 Klandasan Ilir ini merupakan bangunan tua yang sudah termakan usia. Untuk itu ia mengimbau kepada warga lingkungan agar tetap memperhatikan kondisi rumah masing-masing dan bila ada tanda-tanda bangunan yang bermasalah segera melaporkannya. (Bom)

Penulis: Aprianto



Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dr Andi Sri Juliarti (ANTARA/novi abdi)

DINKES BALIKPAPAN PRIORITASKAN 10 RIBU DOSIS VAKSIN DBD UNTUK ANAK USIA 6-15 TAHUN

BALIKPAPAN - Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) memprioritaskan anak usia 6-15 tahun untuk mendapatkan vaksinasi demam berdarah dengue (DBD) dengan kuota sekitar 10 ribu dosis.

"Kita akan mulai vaksinasi November mendatang," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Balikpapan Andi Sri Juliarti di Balikpapan, Rabu (11/10/2023).

Karena jumlah vaksin yang tersedia hanya 10 ribu dosis, lanjut Juliarti, pihaknya mengutamakan kecamatan yang kasus DBD-nya paling banyak, yaitu Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah. "Kami memulai pemberian vaksin pada sekolah-sekolah yang berada di dua kecamatan tersebut dan vaksinasi akan dilakukan oleh tenaga medis Puskesmas setempat," katanya.

Sementara itu, sepanjang Oktober 2023, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah terkait vaksinasi tersebut. Selanjutnya, informasi tersebut disampaikan kepada para guru, siswa dan orang tua atau wali murid, sebab vaksinasi ini perlu izin orang tua atau wali murid.

Vaksinasi adalah satu upaya mencegah penyakit demam berdarah. Upaya lainnya adalah dengan memutus siklus hidup nyamuk aedes aegypti, nyamuk yang mem-

bawa virus tersebut dan menularkannya kepada manusia.

Pemutusan siklus dengan cara sederhana, yaitu dengan melakukan 3M (menguras, menutup, mengubur) pada tempat-tempat atau benda-benda yang menampung air bersih. Dengan menghilangkan genangan atau tampungan air bersih, nyamuk kehilangan tempat berkembang biak, juga mematikan larva nyamuk atau jentik-jentik yang ada di air tersebut.

Untuk tempat air yang besar dan tidak bisa ditutup, dapat digunakan abate atau larvasida. Agar lebih efektif, 3M harus dilakukan dalam satu lingkungan secara serentak. Warga dapat melakukannya dengan bergotong royong. Kadinkes mengungkapkan sejak Januari hingga akhir September 2023, kasus demam berdarah di Balikpapan mencapai 1.681 penderita dengan empat meninggal dunia, yang seluruhnya anak-anak.

"Jumlah itu ada peningkatan. Tahun lalu sebanyak 1.400 kasus. Karena itu, saya ajak masyarakat untuk mengaktifkan lagi kader jumantiknya, untuk kembali lagi bergotong royong membersihkan lingkungan dan menerapkan 3M," kata Juliarti. (Ant/MK)

Pewarta : Novi Abdi

Editor : Endang Sukarelawati



Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra.

PERTAMINA BANTAH ISU PENGHAPUSAN PERTALITE, HANYA PENAMBAHAN BAHAN NABATI

BALIKPAPAN - Arya Yusa Dwicandra, Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, mengklarifikasi terkait rumor penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat.

Arya ingin menjelaskan tidak ada rencana untuk menghapus Peralite. Yang benar adalah Pertamina saat ini sedang melakukan studi untuk menambahkan komponen bahan bakar nabati ke Peralite.

"Peralite saat ini memiliki angka oktan atau RON 90. Dengan penambahan bahan bakar nabati seperti etanol, kami berharap dapat meningkatkan angka oktan ke 92. Ini berarti, di masa depan, jika hal ini tercapai dengan harga yang sama, konsumen akan mendapatkan BBM dengan angka RON yang lebih tinggi. Hal ini akan membuat bahan bakar untuk kendaraan menjadi lebih bersih dan mesin menjadi lebih tahan lama," jelasnya, Kamis (12/10/2023).

Lebih lanjut, Arya menjelaskan bahwa ini tidak berarti Pertamina akan sepenuhnya menghentikan penjualan Peralite, tetapi mereka akan menambahkan bahan bakar nabati ke dalam

Peralite, yang akan meningkatkan angka oktannya.

"Kami semua tahu bahwa sebagian besar kendaraan saat ini memerlukan BBM dengan angka RON minimal 92. Oleh karena itu, ketika kami menjual Peralite, sebenarnya sudah di bawah spesifikasi mayoritas kendaraan saat ini," tambahnya.

Salah satu alasan di balik langkah ini adalah untuk mendukung keberlanjutan atau konsep energi hijau yang semakin diperlukan. Indonesia tidak ingin tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki BBM dengan angka oktan 92.

Sementara itu, mengenai harga, Arya menyatakan bahwa saat ini masih dalam tahap penelitian. Namun, yang pasti adalah selama subsidi BBM masih berlaku di Indonesia, Pertamina akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menanggung harga BBM.

"Kami akan mempertimbangkan hal ini, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Harga akan disesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah," tutupnya. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdullah.

PERUBAHAN PETA CALON WAWALI BALIKPAPAN: BUDIONO MUNDUR, DUKU RISTI UTAMI DEWI

BALIKPAPAN - Bakal calon Wakil Walikota (Wawali) terpilih dari fraksi PDI Perjuangan, Budiono, mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan dan berniat untuk mendukung Risti Utami Dewi.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdullah, setelah rapat Paripurna Penetapan APBD Perubahan 2023 yang berlangsung pada Rabu (11/10/2023) kemarin.

Abdullah menjelaskan bahwa terdapat surat tembusan dari PDI Perjuangan yang berisi pengalihan nama calon yang diusulkan sebagai calon Wakil Wali Kota Balikpapan. Awalnya, Budiono diajukan sebagai calon Wawali, namun kini rekomendasi tersebut dialihkan kepada Risti Utami Dewi.

"Ada informasi menarik bahwa saudara Budiono ternyata mengundurkan diri, dan rekomendasinya pindah kepada Bu Risti," ujar Abdulloh kepada wartawan pada Rabu (11/10/2023).

Abdulloh menjelaskan bahwa karena surat tersebut hanya berupa tembusan, sesuai dengan penetapan awal yang dikirimkan oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, maka dua nama ini yang akan diproses.

"Terkait dengan Pak Budiono, saya belum melakukan verifikasi apakah berkas

pencalonan sebagai calon Wakil Walikota Balikpapan sudah dilengkapi atau belum," jelasnya.

Jika belum lengkap, apakah akan dinyatakan gugur dengan sendirinya? Abdulloh menyatakan bahwa untuk masalah tersebut, Panitia Pemilihan (Panlih) Balon Wawali Kota Balikpapan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami akan berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai pertimbangan mereka jika dalam proses pencalonan ada yang mengundurkan diri tiba-tiba. Apakah boleh hanya ada satu calon atau harus mengajukan dua calon lagi, atau mungkin dua calon yang sudah diajukan tidak boleh mengundurkan diri," tambahnya.

Untuk menangani situasi ini, pihaknya saat ini tengah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memahami bagaimana prosedur jika salah satu calon mengundurkan diri selama proses pemilihan. Apakah boleh ada satu calon tunggal atau harus mengajukan dua calon lagi, atau mungkin dua calon yang sudah diajukan tidak boleh mengundurkan diri.

"Seharusnya, jika tidak ada masalah dari PDIP, kami sudah bisa menjalankan proses pemilihan," tutup Abdullah. (ADV/DPRD Balikpapan/Bom)



Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono. (Antaraneews Kaltim/Fandi)

JELANG PEMINDAHAN IKN 2024, LEGISLATOR KALTIM DESAK PENINGKATAN LAYANAN BANDARA SAMS BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Anggota DPRD Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono mengatakan peningkatan dan pengembangan layanan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan menjadi upaya penting dan mendesak guna mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur mulai 2024.

"Bandara itu menjadi pintu masuk ke Provinsi Kalimantan Timur sekaligus akses ke IKN. Meskipun ada bandara VIP khusus, para penumpang domestik juga akan tetap lewat Bandara Sepinggang," kata Sapto di Balikpapan, Rabu (11/10/2023), tentang bandara yang lebih dikenal sebagai Bandara Sepinggang itu.

Merujuk data PT Angkasa Pura I, Sapto menyebut landasan pacu Bandara Sepinggang akan diperpanjang menjadi 3.250 meter dari sebelumnya 2.500 meter.

Selain itu, gedung bandara juga akan diperlebar guna mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang seiring pemindahan IKN.

"Bagaimana orang mau masuk ke IKN kalau bandara kita (Sepinggang) tidak dioalah terbaik?" ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Operasional PT

Angkasa Pura I Indah Preastuty, mengatakan BUMN pengelola bandara itu akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan fasilitas Bandara Sepinggang.

"Jika ada kapasitas ruang atau fasilitas yang kurang, AP I akan meningkatkan kapasitas dan fasilitasnya," ungkapnya.

Salah satu upaya langkah awal untuk masukan peningkatan layanan dan fasilitas Bandara Sepinggang, menurut Indah, adalah penyelenggaraan diskusi terpusat atau Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah pihak.

Pihak-pihak yang terutama menjadi perhatian Angkasa Pura yaitu pelaku penerbangan dan pariwisata. FGD itu memfokuskan pada antisipasi peningkatan penerbangan, termasuk pemenuhan fasilitas.

Selain sejumlah penerbangan domestik, Bandara Sepinggang juga punya rute penerbangan internasional seperti ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam.

Saat ini, Bandara Sepinggang juga menjadi salah satu pusat penghubung maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink. (Ant/MK)

Pewarta : Arumanto

Editor : Indra Cultom



PEMKAB PASER BAKAL BANGUN PABRIK MINYAK GORENG

**KURANGI TPS, DLH KABUPATEN
PASER UPAYAKAN UBAH
PENGELOLAAN SAMPAH**





Kelapa sawit di Paser

PEMKAB PASER BAKAL BANGUN PABRIK MINYAK GORENG

PASER - Hilirisasi hasil perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser mulai diwujudkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Wujud itu dilakukan, dengan membangun pabrik minyak goreng pada November 2023 ini.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Paser, Yusuf menyatakan, pabrik minyak goreng itu nantinya dibangun di Desa Bukit Seloka, Kecamatan Long Ikis.

Rencananya, pembangunan pabrik minyak goreng itu berkapasitas 1 ton yang mampu menghasilkan 200 liter minyak goreng. Ke depan, pengelolaannya bakal diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama Koperasi yang ada.

"Akan dibangun oleh pemerintah lalu dikelola BUMDes dan

Koperasi. Nanti mesinnya bisa menampung 1 ton dengan hasil 200 liter," kata Yusuf.

Diprediksi ke depan, jika mesin pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi minyak goreng berdurasi 24 jam, maka hasil produksi yang dicapai bisa 400 liter per hari. Adapun tahap yang sedang dilakukan yaitu pengadaan alat. Sementara pembangunan sudah masuk perencanaan.

Dijelaskan Yusuf, pembangunan pabrik ini merupakan upaya Pemkab Paser dalam mengakomodir komoditas utama yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Paser yang dominan berprofesi sebagai petani kepala sawit.

"Jadi tidak perlu lagi minyak goreng dari luar (daerah)," katanya.

Kebijakan tersebut katanya untuk pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dalam menggerakkan perekonomian

masyarakat. Pemkab Paser menganggarkan Rp 1,3 miliar untuk pembangunan pabrik beserta peralatan produksi di tahun 2023 ini.

Dipilihnya pendahukuan pertama di Desa Bukit Seloka, jelas Yusuf, karena komitmen pengelolaan dari pihak Pemerintah Desa (Pemdes) yang bisa meyakinkan Pemkab Paser. Selain itu, Desa Bukit Seloka juga memiliki lahan yang cukup luas.

"Jika ini berjalan lancar, berikutnya desa lain bisa kita bangun juga pabrik skala kecil ini," kata Yusuf.

Sekadar diketahui, program ini merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Paser 2023 dalam mempersiapkan sektor pertanian dan industrinya agar menghidupkan UMKM dan perekonomian lainnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Penumpukan sampah di TPS Desa Tapis

KURANGI TPS, DLH KABUPATEN PASER UPAYAKAN UBAH PENGELOLAAN SAMPAH

PASER - Selain Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser, keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan juga diperlukan. Sejauh ini, tersisa 35 dari 93 unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kelurahan Tanah Grogot yang dihilangkan.

Kepala DLH Kabupaten Paser, Achmad Safari mengatakan, pihaknya masih terus berupaya dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Pengelolaan itu dengan mengubah pola pembuangan sampah.

"Pada APBD Perubahan tahun 2023, DLH telah menyiapkan 31 unit kendaraan roda tiga yang

akan diberikan kepada rukun tetangga (RT) untuk keperluan mengangkut sampah," terang Safari, Kamis (12/10/2023).

Kebijakan tersebut, merupakan dampak dari diberlakukannya penghapusan TPS di sejumlah ruas jalan perkotaan. Sebelumnya, pada tahun 2022 DLH Paser juga telah memberikan kendaraan roda tiga pada 7 RT di Kelurahan Tanah Grogot dan 3 kampung Proklam.

"Ke depannya, kami akan mengupayakan untuk mereduksi atau mengurangi sampah dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat," tambah Safari.

Saat ini, DLH Paser telah melewati proses penilaian untuk mendapatkan penghargaan un-

tuk mendapatkan Adipura. Sebelumnya, pada Maret lalu pertama kalinya Kabupaten Paser berhasil meraih Piala Adipura dari KLHK untuk kategori kota kecil.

"Piala Adipura yang diterima Pemkab Paser untuk menjadi motivasi bagi masyarakat agar terus menjaga lingkungannya," jelasnya.

Safari mengaku, orientasi dari DLH Paser bukan piala Adipura melainkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan. "Karena menjaga lingkungan ini, merupakan budaya yang harus dibiasakan dan dipupuk sejak dini," tutupnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Para pejabat utama yang berganti

POLRES PASER ROTASI 2 PERWIRA, KAPOLRES : BEKAL PENGEMBANGAN DIRI

PASER - Rotasi pejabat utama di Kepolisian Resort (Polres) Paser kembali terjadi. Kapolres Paser, AKBP Kade Budiarta, memimpin upacara serah terima jabatan dua perwira pejabat utama di Polres Paser, Kamis (12/10/2023).

"Mutasi di organisasi Polri merupakan hal biasa untuk memberikan kesempatan pengalaman dan keluasan wawasan bagi pejabat yang bersangkutan," kata Budi.

Ia mengatakan mutasi sebagai bekal pengembangan diri maupun jenjang karier berikutnya sesuai tujuan pembinaan personil. Budi mengharapkan mutasi yang dilaksanakan menjadi momen meningkatkan semangat.

Selain itu menjadikan disiplin dan etos kerja dalam pelaksanaan tugas serta memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara secara profesional. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian selama bertugas.

"Selamat kepada pejabat baru, kepada saudara, segera menyesuaikan diri dan jalin komunikasi dengan masyarakat," katanya.

Ia juga mengajak seluruh personel Polres Paser baik Polri maupun PNS Polri memberikan dukungan dan kerjasama kepada pejabat baru, seperti yang telah ditunjukkan selama ini kepada pejabat lama.

Sementara itu dua pejabat yang dimutasi dan diserahterimakan jabatannya adalah Kasat Intelkam Polres Paser yang sebelumnya dijabat AKP Rakhmad Wiwid Dianto kini diserahkan ke AKP Ibnu Tri Yunarto.

Selanjutnya, Kapolsek Tanah Grogot yang sebelumnya dijabat IPTU Andi Kasman, diserahkan kepada IPTU Agus Sanyoto. AKP Rakhmad Wiwit Dianto menempati jabatan baru sebagai Kanit 3 Subdit 1 Dit Intelkam Polda Kaltim dan Iptu Andi Kasman, SH menempati jabatan sebagai Paur Anev Bagbinops Dit Pam Obvit Polda Kaltim.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI JUMAT
13 OKT 2023



PEMROV KALTIM REALISASIKAN PENDAPATAN DAERAH 2023 CAPAI RP 12,48 TRILIUN





Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik. ANTARA/HO-Biro Adpim Pemprov Kaltim

PEMPROV KALTIM REALISASIKAN PENDAPATAN DAERAH 2023 CAPAI RP 12,48 TRILIUN

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merealisasikan pendapatan daerah 2023 mencapai angka 66,75 persen dengan total nilai sebesar Rp12,48 triliun, hingga 30 September 2023.

Pendapatan daerah Kaltim sendiri setelah APBD Perubahan 2023 ditargetkan sebesar Rp18,69 triliun, sehingga masih terdapat selisih Rp6,21 triliun atau 33,25 persen yang harus dicapai hingga akhir tahun ini.

"Kita akan bekerja keras dan bekerja sama untuk mencapai target ini," kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Samarinda, Rabu (11/10/2023).

Sukses pengumpulan pun-di-pundi Kaltim itu diperoleh dari tiga bagian yakni, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah.

PAD Kaltim tahun ini ditargetkan sebesar Rp9,2 triliun. Sementara realisasi hingga 30 September 2023 sudah mencapai Rp7,53 triliun atau 81,5 persen. Selisih yang masih akan dikejar sebesar Rp1,7 triliun atau 18,5 persen.

Penerimaan daerah berikutnya bersumber dari pendapatan dana transfer yang ditargetkan sebesar Rp9,36 triliun.

Saat ini realisasinya sudah mencapai Rp4,86 triliun atau

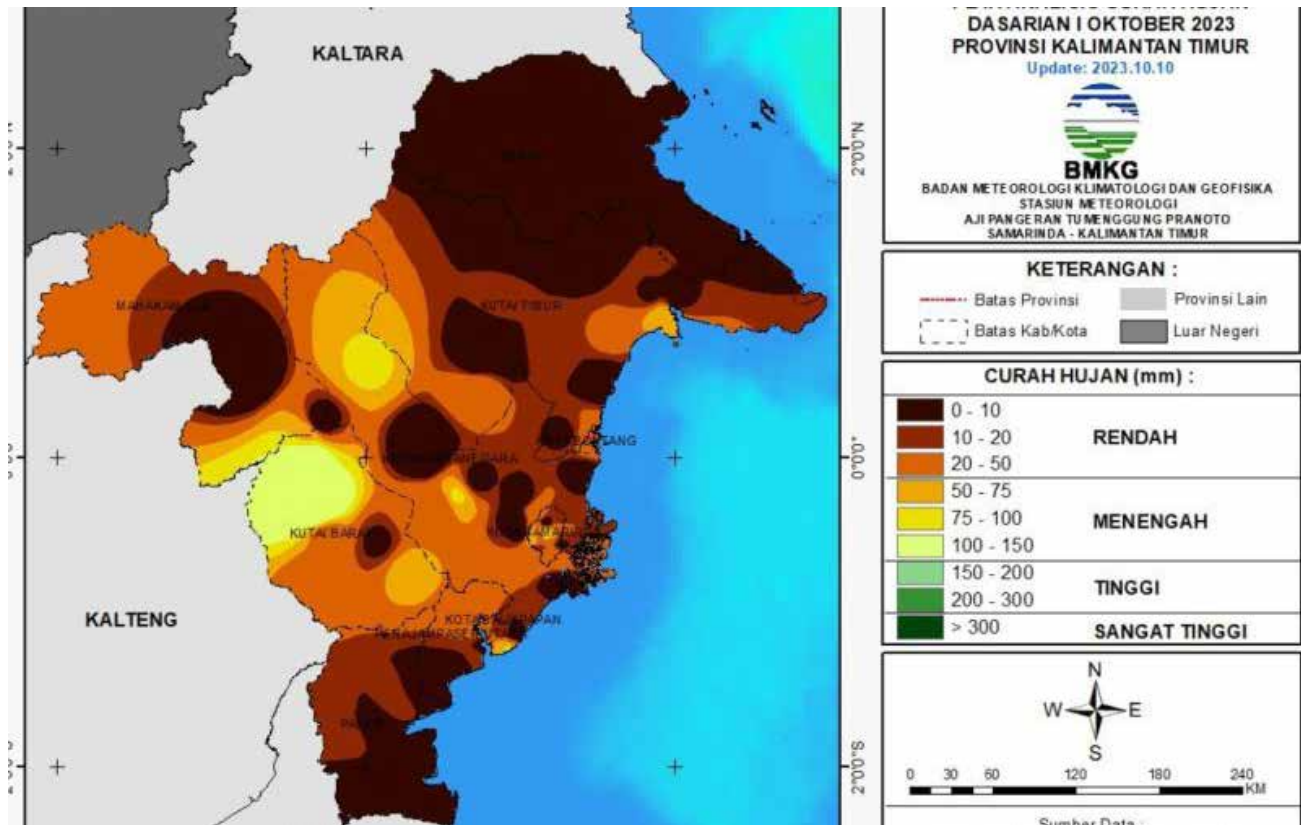
51,89 persen. Artinya, masih terdapat Rp4,5 triliun atau 48,11 persen pendapatan dana transfer yang diharapkan masuk ke kas daerah Kaltim hingga akhir Desember 2023.

Sumber ketiga penerimaan Kaltim adalah lain-lain pendapatan daerah. Jumlahnya mencapai Rp83,8 miliar dari target Rp83,01 miliar atau terdapat peningkatan sebesar 1,04 persen.

"Pendapatan daerah Kaltim tahun ini ditargetkan sebesar Rp18,69 triliun, lebih tinggi dari capaian 2022 sebesar Rp16,8 triliun," kata Akmal Malik. (Ant/MK)

Pewarta : Arumanto

Editor : Ahmad Buchori



Peta prakiraan hujan di Kaltim pada dasarian II Oktober 2023 (Antara / HO BMKG Samarinda)

MINGGU INI, WILAYAH KALTIM BERPELUANG HUJAN 90 PERSEN

SAMARINDA - Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan mengalami hujan kategori rendah antara 0-50 milimeter (mm) dengan peluang 90 persen pada dasarian II Oktober (11-20 Oktober), sehingga semua pihak diminta waspada terhadap dampaknya seperti jalan licin dan genangan air.

"Sedangkan untuk wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) bagian barat diperkirakan terjadi hujan pada kategori menengah antara 50 - 150 mm dengan peluang berkisar 60 - 80 persen," ujar Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Aji Pangeran Tumenggung Pranoto BMKG Samarinda Riza Arian Noor di Samarinda, Kamis (11/10/2023).

Sedangkan pada prakiraan deterministik curah hujan dasarian II Oktober 2023, secara umum wilayah Kaltim bagian timur diperkirakan terjadi curah hujan dengan intensitas rendah antara

10 - 50 mm.

Namun untuk wilayah Kaltim bagian barat diperkirakan terjadi hujan pada kategori menengah antara 50 - 150 mm. Untuk curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi di Kabupaten Berau bagian barat dengan intensitas menengah antara 100 - 150 mm.

Pada prakiraan deterministik sifat hujan dasarian II Oktober 2023, lanjutnya, wilayah Kaltim diperkirakan didominasi dengan sifat hujan kategori bawah normal.

"Kecuali untuk Kabupaten Berau bagian barat, Kutai Timur bagian barat, sebagian kecil Kutai Kartanegara bagian utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu bagian barat laut yang diperkirakan mengalami sifat hujan kategori normal," katanya.

Ia juga mengatakan, pada dasarian I Oktober, wilayah Kaltim umumnya mengalami curah hujan kategori rendah hingga ting-

gi berkisar 0 - 150 mm.

Curah hujan dengan intensitas di bawah 10 mm terjadi di sebagian besar wilayah Kaltim, sedangkan curah hujan tertinggi di atas 150 mm terjadi di Kabupaten Kutai Barat yang meliputi Kecamatan Long Iram, Damai, Nyuatan, dan Kecamatan Tering.

Sementara untuk peta monitoring hari tanpa hujan dasarian I Oktober 2023, Provinsi Kaltim pada umumnya masih mengalami hujan dan hari tanpa hujan.

Wilayah yang mengalami hari tanpa hujan memiliki kriteria sangat pendek antara 1-5 hari hingga kriteria panjang antara 21 - 30 hari.

"Hari tanpa hujan terpanjang terjadi di Kabupaten Paser, tepatnya di Kecamatan Tanah Grogot dan Kuaro dengan jumlah hari tanpa hujan sebanyak 22 hari," kata Riza. (Ant/MK)

Pewarta : M.Ghofar

Editor : Zita Meirina



Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik. ANTARA/HO-Biro Adpim Pemprov Kaltim

PJ GUBERNUR KALTIM BAKAL KEMBANGKAN LUMBUNG PANGAN DI DAERAH

SAMARINDA - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik mengembangkan lumbung pangan di daerah melalui berbagai program transformasi bidang pertanian.

Menurut Akmal Malik, perlu ada keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pengembangan lumbung-lumbung pertanian.

Alasannya, meski Kaltim dikenal kaya sumber daya alam mineral, di masa depan kebutuhan pangan penduduk Kaltim dan IKN (Ibu Kota Nusantara) dipastikan semakin besar.

"Kita ingin mendorong transformasi agraris. Bonus sumber daya mineral ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena sampai mati pun orang tidak akan pernah makan batu bara. Kita tetap makan nasi yang berasal dari beras," kata Pj Gubernur Akmal Malik di Samarinda,

Rabu (11/10/2023).

Karena itu, Kaltim harus bisa menggerakkan secara berimbang eksploitasi sumber daya alam dan pengembangan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masa depan.

"Berdosa kita kepada anak cucu, kalau tidak bisa menyipkan ini," tegas Akmal.

Untuk lokasi pengembangan lumbung pangan dimaksud, Akmal menyebut tak harus berada di Kota Samarinda.

"Lokasinya ini yang harus segera kita cari. Bukan harus di Samarinda, Kutai luas kok. Bisa juga di Berau atau di Penajam Paser Utara dan Paser," kata Akmal.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan Kaltim di masa depan, lumbung pangan dimaksudkan juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan IKN.

Hingga September 2023, informasi dari Dinas Pangan, Tanaman

Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim tercatat jumlah produksi padi mencapai 178.662 ton dengan hasil beras sebanyak 115.362 ton.

Produksi tertinggi berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 43.432 ton, PPU 19.945 ton, Berau 16.452 ton, Kutai Barat 5.826 ton, Paser 5.792 ton, Kutai Timur 8.676 ton, Mahakam Ulu 4.742 ton, Samarinda 3.429 ton, Balikpapan 100 ton dan Bontang 65 ton.

Total luas tanam di Kaltim 33.952 hektare dan total luas panen 48.418 hektare. Luasan panen tertinggi ada di Kutai Kartanegara 18.581 hektare dan luas terendah di Kota Bontang 24 hektare.

Secara umum daerah sentra produksi tanaman pangan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Paser untuk padi dan Berau dengan sentra jagung. (Ant/MK)

Pewarta : Arumanto
Editor : Ahmad Buchori



M. Udin Anggota DPRD Kaltim Fraksi Golkar

PJ GUBERNUR DIMINTA HARUS SELESAIKAN “PR” PENINGGALAN ISRAN-HADI YANG BELUM TUNTAS

SAMARINDA - Anggota DPRD Kalimantan Timur, M. Udin menyinggung sejumlah program Isran-Hadi yang belum tuntas pasca berakhirnya masa jabatan duet tersebut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Menurutnya pekerjaan rumah alias PR tersebut kini ada di tangan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik.

“Perlu menjadi koreksi. Beliau (Isran) juga menyadari bahwa banyak masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan selama lima tahun jabatan,” tegasnya kepada awak media.

Udin menyebut persoalan infrastruktur jalan masih menjadi sorotan yang harus segera dientaskan Pj Gubernur. Menurutnya masih banyak ruas jalan di Kaltim yang belum dalam kondisi mantap. Semisal jalan ke utara Kaltim yakni Jalan ke Samarinda-Kutai Barat, Samarinda-Bontang, Berau-Tanjung Redeb, Samarinda-Tenggarong-Kota Bangun, dan Tenggarong-Kota Bangun.

“Penyebabnya tentu tambang ilegal, kare-

na setiap koridoran melalui jalan umum. Ini sebenarnya tidak ada ketegasan dari pemerintah kita termasuk aparat,” tegasnya.

Politisi Golkar ini lebih lanjut mengatakan, tugas infrastruktur jalan ini kini menjadi tanggung jawab Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim. Ia meminta Pj Gubernur melakukan evaluasi terhadap dinas teknis terkait jalan.

“Kita berharap bahwa Pj Gubernur bisa membenahi, mengevaluasi berkaitan dengan kinerja seluruh OPD yang berkaitan dengan jalan-jalan dan yang lainnya,” ucapnya.

Tak hanya soal jalan, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan mutu pendidikan juga menjadi persoalan yang harus dibenahi Pj Gubernur Kaltim. Program pelatihan, bimbingan, dan pembinaan harus terus digalakkan untuk meningkatkan raihan yang telah dicapai Isran-Hadi. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun

LUBANG EKS TAMBANG MASIH MENGANGA, DEWAN TAGIH TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BATU BARA

SAMARINDA – Sejak 2011 silam ada 45 korban jiwa yang tewas di lubang bekas tambang di Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun berharap tidak ada lagi korban selanjutnya di Bumi Etam.

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, perusahaan batu bara harusnya melaksanakan tanggungjawabnya dengan tidak melakukan pembiaran lubang bekas tambang menganga. Para pengusaha batu bara diminta minimal memberi rambu peringatan di lokasi eks tambangnya.

Apalagi di kawasan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Ia pun meminta Pemerintah dan pihak aparat yang berwajib untuk mengawasi dan menindak tegas bagi perusahaan yang masih acuh akan

tanggung jawabnya,

“Regulasi ataupun aturan sudah ada, tinggal bagaimana perusahaan mau bertanggungjawab. Banyak lubang tambang atau perusahaan tambang yang beroperasi itu tidak jauh dari pemukiman warga,” ungkapnya,” tegasnya.

Selain itu Samsun meminta, masyarakat yang berada tak jauh dari lokasi tambang batu bara untuk melakukan pengawasan khususnya pada anak-anak mereka. Mengingat korban jiwa yang timbul kebanyakan merupakan anak-anak.

“Ayo semua elemen warga menjaga ketentraman Bumi Etam,” tutupnya.(eky/adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir

SUTOMO JABIR DORONG ANGGARAN PENDIDIKAN MENJAMAH DAERAH PELOSOK

SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Fraksi PKB, Sutomo Jabir, mendorong pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalimantan Timur agar tepat sasaran, khususnya pada sektor pendidikan.

Hal demikian mengingat terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada APBD Kaltim dari Rp17,1 Triliun pada tahun 2023 menjadi Rp20,67 Triliun pada tahun 2024. Otomatis alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari pos APBD juga mengalami kenaikan. Menurutnya besarnya anggaran tersebut benar-benar harus tepat sasaran.

"Anggaran pendidikan yang besar, harus terencana

dengan baik, sehingga belanja pendidikan berorientasi kepada kebutuhan pendidikan masyarakat dan bukan kepada kebutuhan SKPD," tegasnya.

Sutomo Jabir mengungkapkan, infrastruktur pendidikan di Kaltim tak sedikit yang masih belum layak, atau bahkan belum dibangun untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Di sejumlah Kabupaten/Kota ia mengatakan masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik dikarenakan terbatasnya ruang kelas. Bahkan ironisnya ada sekolah yang harus melakukan proses belajar mengajar di balai desa.

"Program prioritas wajib belajar 12 tahun. Namun dis-

alah satu Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau tak ada satupun sekolah tingkat SMA," ungkapnya.

Untuk itu ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pemerataan, menjamah sekolah di daerah pelosok/pedalaman agar serapan anggaran pendidikan tak hanya fokus di daerah perkotaan saja.

"Anggaran pendidikan sekitar Rp4 Triliun, jangan hanya diprioritaskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan. Ibaratnya api yang jauh dari panggangan," pungkasnya. (Eky/Adv/Dprd-Kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

 **Grand Kartika**
HOTEL

OK!

TOBER

Deluxe Room

ONLY

~~Rp 698.000,-~~**30% OFF****Rp 488rb**

NETT/NIGHT

benefits**Breakfast**
2 pax**FREE****Laundry**
Up To 2 pcs**FREE****Kopi Inspirasi**
Buy 3, Pay 2**FREE****Afternoon
Tea****FREE****Mini Mantou**
5 pcs **BOOK NOW****0811 581 3669**www.hotelgrandkartika.com